

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Dewasa ini tindak kejahatan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kejahatan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para korbannya.

Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, berstatus sebagai seorang pengangguran atau penduduk miskin. Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan atau tidak mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, dan jumlah tanggungan keluarga yang tidak sedikit.. Dengan kondisi seperti ini memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dimana keterampilan dan pendidikan yang mereka miliki sangat rendah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan melakukan tindak kejahatan seperti melakukan pencurian, perampokan, penipuan yang dapat merugikan harta benda atau hilangnya nyawa seseorang.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Hal ini sangat memerlukan mengingat semakin banyaknya penduduk maka kepadatan penduduk pun juga tinggi. Kepadatan penduduk sendiri masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Tingginya tingkat kepadatan penduduk disuatu daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Berdasarkan penelitian Anata (2013), semakin padat penduduk, maka akan menurunkan PDRB perkapita, sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin menurun, sehingga membuat semakin banyaknya masyarakat yang menganggur, terlebih lagi di provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, sehingga diduga dari kalangan pengangguran tersebut berkemungkinan melakukan tindakan kriminal. Menurut Enrico Ferri dalam buku “Patologi Sosial” oleh Kartono (2009), menyebutkan bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Badan Pusat Statistik mencatat angka kepadatan penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya yakni pada tahun 2014 sebesar 132 jiwa/km², pada tahun 2015 sebesar 134 jiwa/km² dan tahun 2016 sebesar 135 jiwa/km².

Direktur internasional NGO forum on Indonesia Development melaporkan tingkat ketimpangan Indonesia berada di posisi enam dunia. Laporan tersebut berdasarkan kerjasama dengan Oxfam menerbitkan tentang ketimpangan Indonesia dalam laporannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia ternyata belum diikuti dengan pembagian pendapatan yang merata (kompas.com). Ketimpangan ekonomi antar wilayah serta kesenjangan kaya-miskin terasa begitu nyata di Indonesia terutama di daerah perkotaan, Bukan hanya deretan gedung tinggi menjulang di kawasan pusat bisnis modern melainkan juga kantong-kantong pemukiman

kumuh. Salah satu cara untuk mengukur ketimpangan ialah dengan menggunakan rasio gini, semakin besar angka gini semakin besar pula tingkat ketimpangan. (kompas.com)

Penelitian yang dilakukan oleh Madden and Chiu (1998) dalam Baharom and Habibullah (2009) menyajikan model yang menelusuri hubungan yang potensial antara buruknya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya jumlah pencurian, dan hasil terkuat menunjukkan bahwa peningkatan perbedaan ketimpangan secara relatif meningkatkan tingkat kriminalitas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data ketimpangan pendapatan dari gini ratio pada maret 2016 sebesar 0,39. Angka ini menurun 0,02% dibandingkan maret 2015 yang sebesar 0,41. Tingginya angka ketimpangan ekonomi secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian itu sendiri maupun sisi lain kehidupan, salah satunya adalah kriminalitas. *Teori rational choice* yang diperkenalkan oleh Gary Becker, memberi kesimpulan bahwa semakin besarnya perbedaan *income* dari kegiatan ilegal dengan *opportunity cost* (termasuk di dalamnya pendapatan dari kegiatan legal) akan menjadi insentif kegiatan kriminalitas.

Selain ketimpangan, salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas adalah kemiskinan karena pada dasarnya hidup dengan keterbatasan serta kekurangan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan sehingga dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut seseorang rela melakukan berbagai cara termasuk tindak kriminalitas. Penelitian yang dilakukan oleh Khan (2015) memperlihatkan bahwa adanya hubungan yang positif antara tingkat kejahatan dan kemiskinan dalam jangka panjang akan tetapi dalam jangka pendek memiliki hubungan yang negatif. Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan penyakit mental yang tinggi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengadopsi perilaku kriminal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia menurun setiap tahunnya. Angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren yang positif, akan tetapi kemiskinan

merupakan masalah terbesar dan menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kriminal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pada tahun 2014 sebesar 11,25%, tahun 2015 sebesar 11,22% dan pada tahun 2016 sebesar 10,86%.

Sebuah studi menyatakan bahwa orang kelas bawah memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dari kelompok lainnya. Orang yang berpenghasilan rendah, pengangguran, berpendidikan rendah jauh lebih mungkin melakukan tindak kejahatan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga memberikan insentif untuk melakukan semua jenis tindak kriminal (Arvanties dan Defina dalam Hooghe, 2010). Wolpin (1978) dan Wong (1995) (dalam Hardianto, 2009) menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas suatu wilayah. Di Indonesia sendiri angka pengangguran masih tergolong tinggi, dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 6,18% pada tahun 2016 sebesar 5,61% dan pada tahun 2017 sebesar 5,33%. Berita tentang kriminalitas hampir sertiap hari dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Dewasa ini tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia khususnya daerah perkotaan sedang marak terjadi. Fenomena ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran dan kepadatan penduduk bila terus tumbuh dan tidak segera diatasi maka akan berpotensi mengakibatkan melonjaknya angka kriminalitas.

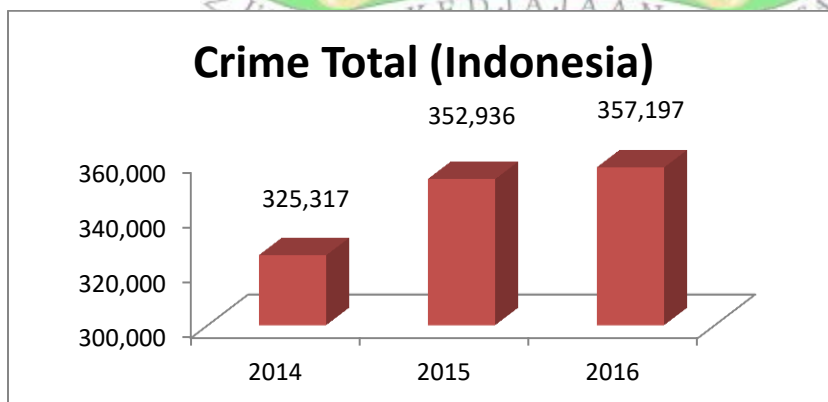
Sementara itu, menurut numbeo.com dari indeks kejahatan pada tahun 2015 yang lalu, Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara . Dan dalam laporan numbeo.com tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke 52 dari 115 negara dengan safety index 55,28 dan crime rate 44.72. Negara dengan tingkat keamanan terbaik adalah Jepang dengan safety index 89,90 dan crime index 13.10. Pada level Asia Indonesia berada pada peringkat ke 13 dari 38 Negara yang di index. Posisi crime rate dan safety index Indonesia yang diberikan numbeo.com

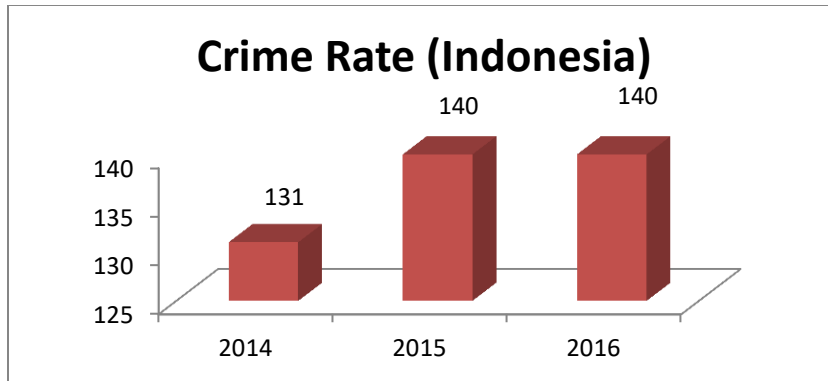
tampaknya tidak jauh berbeda dengan cerminan tingkat tindak pidana yang disajikan BPS Indonesia.

Pemerintah masih memerlukan kerja keras untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, tingkat kriminalitas di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda kearah angka menurun. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Selama periode tahun 2014–2016, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung meningkat. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2014 sebanyak 325.317 kasus, meningkat menjadi sebanyak 352.936 kasus pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 357.197 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 131 orang pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 140 orang.

Gambar 1.1

Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2014-2016





Sumber: BPS, 2017

Belum bergesernya angka resiko penduduk Indonesia terkena tindak pidana sekaligus mengingatkan setiap penduduk untuk waspada terkena korban tindak pidana. Hal ini setidaknya dikarenakan angka tindak pidana yang terus meningkat dan belum berhasil ditekan ke level menurun. Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang sedemikian rupa dan tidak selalu berbanding lurus dengan angka crime rate. Bahkan ada tindak kriminal yang terjadi sulit diterima akal sehat. Berbagai laporan menyebutkan, meningkatnya tindak kriminal disebabkan atau dipicu berbagai persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum. Selain itu kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak.

Berdasarkan data yang telah disampaikan sebelumnya dapat diketahui bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pendistribusian pendapatan yang tidak merata, akan menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang belum sejahtera, sehingga akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Terlebih lagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia setelah RRC (Republik Rakyat Cina), India, dan Amerika Serikat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, bahwa kepadatan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah yang besar tersebut diperkirakan berbanding lurus dengan terjadinya tindak kejahatan yang besar. Hal ini diduga akan menimbulkan masalah lain, seperti ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, sehingga secara tidak langsung tingginya jumlah penduduk turut berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Tekanan untuk bertahan hidup akan mendorong manusia untuk bertindak apapun agar dapat memenuhi kebutuhannya. Tekanan tersebut akan sangat tinggi terutama pada penduduk yang ada di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Kriminalitas sendiri harus diberantas karena dapat merugikan secara materi maupun non materi. Rasa aman juga merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh atau dinikmati oleh semua orang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk menjaga keamanan dengan pihak kepolisian (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dibentuklah rumusan masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi tingkat kriminalitas, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh antara tingkat kriminalitas, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tingkat kriminalitas, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh antara tingkat kriminalitas, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk di Indonesia.
3. Mengidentifikasi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah, masyarakat, dan kalangan akademis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah.

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan untuk Pemerintah Indonesia dalam mengalokasikan jumlah tenaga keamanan seperti jumlah polisi perkapita dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan di Indonesia, Serta menjadi masukan bagi

pemerintah Indonesia dalam hal pemertaan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan kepadatan penduduk yang terjadi.

2. Peneliti dan Mahasiswa

Dan bagi peneliti dan mahasiswa selanjutnya diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi secara menyeluruh sebagai referensi bagi penulis lainnya yang akan melakukan penelitian.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas pada 31 provinsi di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2016. Berikut ruang lingkup penelitiannya:

1. Periode tahun analisis yang digunakan adalah tahun 2008 hingga 2016.
2. Variabel yang digunakan terdiri dari tingkat kriminalitas, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran dan kepadatan penduduk. Variabel lain diluar variabel tersebut tidak akan dibahas pada penelitian ini.
3. Penelitian ini mengambil tiga puluh satu provinsi sebagai objek penelitian. Ketiga puluh satu provinsi tersebut yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi kedalam 6 bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti serta hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan langkah - langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian, yang diantaranya adalah definisi operasional dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data sampai dengan teknik analisis data.

Bab IV : Objek Penelitian

Berisikan gambaran umum (deskripsi objek penelitian yang diperoleh).

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab yang memperlihatkan hasil penelitian, pembahasan masalah dan implikasi kebijakan.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan saran-saran mendukung yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan hasil penelitian.

